

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA  
ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NOMOR : 170/SK-24/DPRD/11/2025

NOMOR : /SKB/HK/2025

TANGGAL : 28 November 2025

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KANUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM SUDAH TIDAK RELEVAN DENGAN PERATURAN DIATASNNYA	BARU	2025	2026	SATPOL PP	
2.	PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	BARU	2025	2026	DPRD	
3.	RISET DAN INOVASI DAERAH	MENGATUR PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI OLEH DAERAH, PERAN BRIDA, PENDANAAN, KEMITRAAN, SERTA PEMANFAATAN HASIL RISET UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH.	BARU	2025	2026	BRIDA	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
4.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RTRW	TINDAK SURAT REKOMENDASI DARI A.N. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG TANGGAL 11 AGUSTUS 2025 PERIHAL REKOMENDASI ATAS PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	UBAH	2025	2026	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
5.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2026-2045	ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JANGKA PANJANG, PENETAPAN KAWASAN DAN DESTINASI PRIORITAS, STRATEGI PEMASARAN, PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, INFRASTRUKTUR, SERTA MEKANISME EVALUASI PENGEMBANGAN PARIWISATA	BARU	2025	2026	DISPAR	
6.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 2025-2045	PENATAAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN	BARU		2026	DISPERINDAG	

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI</b>	<b>SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT</b>	<b>TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD</b>	<b>TAHUN PELAKSANAAN</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>KETERANGAN</b>
7.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL	MENGATUR SECARA KHUSUS PENCEGAHAN DAN PENGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL TERUTAMA PADA ANAK-ANAK	BARU	2025	2026	DPRD	
8.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN	PENAMBAHAN KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBERDAYAAN PEMUDA EQUALITY GENDER DAN DISABILITAS, PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN, KWIRUSAHAAN BERBASIS EKONOMI	UBAH	2025	2026	DPRD	
9.	PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN	PENATAAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERAIRAN, PERPARKIRAN, TRAYEK, KESELAMATAN, PERIZINAN, PENGAWASAN, SERTA INTEGRASI MODA TRANSPORTASI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.	BARU	2025	2026	DISHUB	



NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPAAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
10.	PERAN SERTA DUNIA USAHA DALAM KEMAJUAN DESTINASI WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA	KETERLIBATAN PERUSAHAAN SWASTA DALAM KEMAJUAN WISATA HIBURAN DAN PARIWISATA UNTUK TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN	BARU	2025	2026	DPRD	
11.	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PEMBENTUKAN, PENYESUAIAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	BARU	2025	2026	ORTAL	
12.	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)	PENDATAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS, DUKUNGAN SOSIAL-EKONOMI, AKSES USAHA, DAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH.	BARU	2025	2026	DPRD	
13.	DANA CADANGAN DAERAH	DANA CADANGAN DAERAH YANG BERFUNGSI MENJAMIN KETERSEDIAAN DANA RELATIF BESAR YANG BERSUMBER PADA DANA CADANGAN FISKAL DENGAN KONSEP FISCAL RESERVE FUND YANG DIGUNAKAN UNTUK	BARU	2025	2026	BPKAD	

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
		KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS					
14.	PERDA TENTANG PELAKSANA UU 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP (METODE OMNIBUS)	MENGATUR PENYESUAIAN DAN HARMONISASI SELURUH PERDA YANG TERDAMPAK KUHP BARU, PENEGASAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENEGAKAN NORMA PIDANA TERTENTU, PENGUATAN PERAN SATPOL PP, PENATAAN SANKSI ADMINISTRATIF, SERTA KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM AGAR REGULASI DAERAH SELARAS DENGAN KETENTUAN KUHP 2023	BARU	2025	2026	DPRD	
15.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	
16.	APBD-P TAHUN 2026	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	
17.	APBD TAHUN 2027	ANGGARAN	BARU	2025	2026	BUPATI	

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**AULIA RAHMAN BASRI**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**H. AHMAD YANI**